

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMPETENSI TERHADAP PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA

Sri Suharti¹, Entin Tini Rumsari²

Fakultas Ekonomi - Universitas Islam Nusantara¹
email: srisuharti@uninus.ac.id¹
Fakultas Ekonomi - Universitas Islam Nusantara²
email: entintinir98@gmail.com²

ABSTRAK

Akuntabilitas pemerintahan merupakan hal penting sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik. Akuntabilitas yang baik dapat dicapai melalui penerapan sistem pengendalian internal dan penyelenggara pemerintahan desa yang kompeten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Analisa data menggunakan metode statistik *multiple regression*, analisa korelasi dan determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa, sedangkan kompetensi secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel tersebut. Secara simultan kedua variabel berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Hal tersebut disebabkan karena administrasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah desa telah menggunakan sistem berbasis komputer. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pemerintah meningkatkan kualitas penerapan sistem pengendalian internal dengan cara pemantauan berkelanjutan administrasi pengelolaan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, aparatur desa, kompetensi dan pengendalian internal.

1. PENDAHULUAN

Tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat terhadap dana pembangunan desa terus terjadi. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang mencatat terdapat 46 kasus korupsi dana desa dari 217 kasus di sector anggaran selama tahun 2019, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 32,3 Milyar (Ramadhan, 2020).

Hal ini menyebabkan tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah saat ini sangat tinggi, baik pada tingkat tertinggi yaitu pemerintah pusat maupun pemerintah terendah yaitu desa. Akuntabilitas menjadi tolak ukur komitmen aparatur desa, terhadap organisasi dan masyarakat yang dipimpinnya (Ni Komang Ayu, 2019). Pemerintah sebagai pemegang amanah masyarakat wajib mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas penggunaan dana secara transparan dan akurat (Mahmudi, 2011), (Renyowijoyo, 2013).

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan oleh pemegang amanah (agent) kepada pemberi amanah (*principal*), dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dan dipercayakan (Iqbal, 2012). Akuntabilitas dapat diukur menggunakan indikator (Mahmudi, 2011): yang terdiri dari beberapa aspek penilaian antara lain: 1) Aspek hukum dan kejujuran, adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dan menaati hukum yang berlaku; 2) Aspek manajerial, adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk mengelola organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif; 3) Aspek program, menghendaki organisasi membuat program yang bermutu dan bermanfaat untuk rakyat; 4) Aspek kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambilnya, dan 5) Aspek

financial, adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Berdasarkan *accountability framework*, faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas adalah sistem pengendalian internal (SPI) dan kompetensi pegawai (Arif Widyatama, 2017). Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara bersama-sama untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Mulyadi (2013:164), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan satu kesatuan dari beberapa komponen yang terkoordinir dan saling bersinergi, yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran, untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2013).

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa unsur pengendalian internal meliputi struktur organisasi yang mengatur pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab secara jelas antar pegawai, prosedur yang mengatur aktivitas setiap pegawai dalam berbagai tingkatan, rencana kerja yang menjadi alat ukur kinerja organisasi (Krismiaji, 2015). Menurut Romney (2015), SPI diharapkan dapat berfungsi sebagai melakukan tindakan pengendalian preventif (*preventive control*), dengan mendeteksi sejak dini gejala yang berpotensi menimbulkan masalah; 2) Pengendalian detektif (*detective control*), fungsi ini dijalankan untuk dapat menemukan terjadinya penyimpangan dan sekaligus mencari penyebabnya; 3) Pengendalian korektif (*corrective control*), setelah masalah terjadinya maka pengendalian internal berfungsi mencari solusi untuk memperbaiki masalah dan memulihkannya secara cepat dan tepat serta menjamin kasus serupa tidak terulang dikemudian hari.

Pelaksanaan SPI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, dapat diukur melalui indikator sebagai berikut: 1) Lingkungan pengendalian, dalam hal ini pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan yang mendorong perilaku positif dan kondusif, agar SPI dapat dijalankan dengan baik. Pengendalian lingkungan mencakup: penegakan integritas dan nilai etika, kompeten, struktur organisasi yang efektif, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, dan pembuatan dan penerapan kebijakan yang sehat serta pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan; 2) Penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan indentifikasi dan analisis resiko, menetapkan tindakan pencegahan dan mengevaluasi efektifitas tindakan pencegahan; 3) Kegiatan pengendalian, pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

Sistem pengendalian internal keuangan desa dirancang oleh pemerintah dengan tujuan agar setiap elemen pemerintah berkerja sesuai dengan aturan dan terorganisir dengan baik (Rosyidi, 2018), (Embun Widya Sari, 2017). Beberapa masalah yang ditimbulkan oleh lemahnya penerapan SPI adalah penyalahgunaan anggaran program dan kegiatan pada RPJMDes, RKPDDes, dan APBDDes tidak sesuai kebutuhan masyarakat desa dan keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes. Penelitian terkait telah dilakukan oleh Rita Martini (2019) di beberapa desa di kecamatan sembawa, yang menunjukkan bahwa pengendalian internal berperan dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penerapan SPI pada saat ini, sebagian besar telah berbasis teknologi informasi, yang menggeser peran manusia sebagai tenaga penyusun laporan keuangan, menjadi analis laporan keuangan. Proses akuntansi dimulai dari input – proses dan berlanjut kepada out put dilakukan secara otomatis. Hal ini seharusnya berpengaruh terhadap kompetensi pegawai yang bekerja menyusun laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Zubaidi, dkk menemukan bahwa teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan di kantor Biro layanan informasi dan komunikasi Situbondo (Nabila Zubaidi, 2019).

Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan tugas secara efektif dan efisien. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari kinerja individu dalam melaksanakan pekerjaannya pada situasi tertentu

(Moeheriono, 2014) . Kompetensi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah kemampuan kerja seseorang yang sesuai dengan standar, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Kompetensi dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu: 1) Kompetensi universal, merupakan budaya dan nilai-nilai perusahaan yang dianut oleh pegawai; 2) Kompetensi kepemimpinan, yang harus dikuasai oleh pejabat untuk mengelola staff dalam rentang kendalinya dan menguasai spesialisasi/keahlian. Kompetensi tersebut dipengaruhi oleh faktor dari dalam (*internal*) maupun dari luar (*eksternal*). Faktor tersebut meliputi: Bakat bawaan yang sudah ada sejak mereka dilahirkan, Motivasi, Sikap, motif, dan cara pandang, pengetahuan, skill dan lingkungan (Moeheriono, 2010:17).

Menurut Moeheriono (2010), Dimensi kompetensi terdiri dari: 1) *Task skills*, yaitu keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin; 2) *Task management skills*, merupakan keterampilan mengelola serangkaian tugas yang berbeda; 3) *Contingency management skill*, yaitu keterampilan mengambil tindakan yang cepat dan tepat dalam menghadapi masalah; 4) *Job role environment skills*, yaitu keterampilan bekerja sama dan memelihara kenyamanan lingkungan kerja; 5) *Transfer skill*, yaitu keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja baru.

Setiap individu memiliki karakteristik kompetensi yang berbeda satu dengan lainnya. Karakteristik tersebut muncul dalam bentuk: 1) Watak (*traits*), yang ditunjukkan oleh sikap perilaku dalam merespon sesuatu dengan cara tertentu; 2) Motif (*motive*), yaitu suatu tindakan yang didasarkan pada keinginan; 3) Bawaan (*self-concept*), yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang; 4) Pengetahuan (*knowledge*), yaitu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu atau pada area tertentu dan 5) Keterampilan atau keahlian (*skill*), yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas.

Kompetensi aparatur desa merupakan titik kritis dalam proses pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan secara efektif dan efisien (Rosyidi, 2018), (Hullah, 2012). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menyebutkan sumber masalah dalam pengelolaan keuangan desa berasal dari minimnya pengetahuan perangkat desa. Kondisi demikian menyebabkan timbulnya potensi terjadinya penyelewengan/korupsi. Tendensi penyalahgunaan anggaran desa digunakan untuk kepentingan politik pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dinyatakan oleh DPR (Media Akutansi, 2014).

Hubungan kompetensi terhadap akuntabilitas telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya memberikan hasil berbeda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sapartiningsih dkk (2018), Ekasari Sugiarti dan Ivan Yudianto (2017), menemukan bahwa kompetensi yang ditunjukkan oleh latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan deskripsi jabatan, berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. (Dwi Sapartiningsih, 2018), (Ekasari Sugiarti, 2017). Namun penelitian yang dilakukan oleh Arif Widyatama, dkk (2017) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Banyaknya kasus kecurangan dana desa menunjukkan rendahnya tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa, menjadi suatu hal yang menarik dan penting untuk diteliti. Masalah yang ditemui dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh penerapan SPI dan kompetensi terhadap akuntabilitas pemerintahan desa baik secara partial maupun simultan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur hubungan variabel-variabel tersebut. Penelitian ini berdasarkan hipotesis bahwa terdapat pengaruh positif antara SPI dan kompetensi terhadap akuntabilitas. Penelitian ini merupakan studi empiris dengan sampel Desa Karang Mulya dan Desa Karang Indah yang merupakan desa yang terletak di Bojong Mangu Kabupaten Bekasi. Pemilihan sampel didasarkan pada kondisi riil kedua desa yang pendidikan aparatur desanya relatif masih rendah, SPI kurang baik sehingga mempengaruhi tingkat akuntabilitasnya.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah metode kuantitatif. Dengan metode ini, penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan

diperoleh data-data yang menunjang penyusunan laporan. Penggunaan metode kuantitatif, berdasarkan latar belakang *filosofis* atau *worldviews* (Creswell, 2014) atau *paradigm* (Lincoln & Guba, 2013) positivistic. Penelitian ini dilihat dari sisi kegunaannya dapat digolongkan sebagai *applied research*, namun ditinjau dari sisi tujuan dapat digolongkan sebagai *description research* (Neuman, 2014; Creswell, 2014, Robson. C. 2012), yaitu menjelaskan hubungan antara system pengendalian internal dan kompetensi terhadap akuntabilitas laporan keuangan desa. Desain penelitian menggunakan *correlational design* yaitu menguji dan mengestimasi hubungan banyak variable baik secara parsial maupun simultan melalui teknik *multiple regression* (Creswell, 2012).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, untuk menelaah variabel-variabel guna memperoleh gambaran secara terstruktur, faktual mengenai fakta-fakta dan hubungan antara variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang dijadikan populasi untuk penyebaran kuesioner adalah Aparatur Desa di Kecamatan Bojongmangu yaitu:

1. Aparatur Desa KarangMulya
2. Aparatur Desa Karang Indah

Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Alasan penulis menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Kriteria tersebut adalah aparatur pemerintah desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat yang mengawasi kinerja dari pemerintah dengan jumlah 50 orang .

Data penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan kuesioner. Data pengujian ini merupakan *cross section data* yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu dengan menggunakan kuesioner. Responden diberikan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, untuk diisi dan kemudian dikirim kembali kepada peneliti (Bangin, 2014). Masing-masing indikator diukur dengan skala ordinal dari sangat setuju (SS) sampai sangat tidak setuju (STS)

2.2 Variabel & Indikator

Variabel-variabel yang diteliti terdiri dari variabel Bebas/Independen yaitu variabel X1 Kompetensi Aparatur Desa dan Variabel X2 Sistem Pengendalian Internal, sedangkan variabel terikat Y adalah akuntabilitas pemerintah desa. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dependen dan independent adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Sistem Pengendalian Internal (X1)	<ol style="list-style-type: none">1. Lingkungan Pengendalian:<ol style="list-style-type: none">a. Penegakan integritas dan nilai etikab. Komitmen terhadap kompetensic. Kepemimpinan yang kondusifd. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhane. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.2. Penilaian risiko:<ol style="list-style-type: none">a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan.b. Identifikasi risiko.c. Analisis risiko.3. Kegiatan pengendalian

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan..
 - b. Pembinaan sumber daya manusia.
 - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
 - d. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.
4. Pemisahan fungsi.
 5. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
 6. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting

Variabel	Indikator
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Informasi dan komunikasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. b. Mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus 8. Pemantauan pengendalian internal <ol style="list-style-type: none"> a. Pemantauan berkelanjutan. b. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan <i>review</i> lainnya
Kompetensi Desa (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Watak (<i>traits</i>) <ol style="list-style-type: none"> a. Sopan b. Jujur c. Disiplin d. Ramah 2. Pengetahuan (<i>knowledge</i>) <ol style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan aparatur terhadap bidang kerjanya b. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan 3. Keterampilan (<i>skill</i>) <ol style="list-style-type: none"> a. Keahlian teknis b. Kemampuan mencari solusi
Akuntabilitas Pemerintah Desa (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur. b. Adanya kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan . 2. Akuntabilitas Manajerial: Adanya pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. 3. Akuntabilitas Program, adanya pertanggungjawababan mengenai pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. 4. Akuntabilitas kebijakan, Adanya kebijakan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil.

5. Akuntabilitas financial, Adanya penggunaan public money

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Berdasarkan pengujian menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Analisis regresi pengaruh sistem pengendalian internal (x1) dan kompetensi (x2) terhadap akuntabilitas pemerintahan desa (y).

Tabel 2. Analisa Regresi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-8.332	6.139		-1.357	.182
	sistem_pengendalian_internal	.384	.058	.741	6.577	.000
	Kompetensi_aparatur_desa	.066	.153	.049	.432	.668

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS 24

Tabel 2 diatas menunjukkan nilai constanta (α) sebesar 8,332, koefisien regresi sistem pengendalian sebesar 0,384 dan kompetensi aparatur desa sebesar 0,066. Persamaan model regresi linear berganda adalah:

$$Y = 8,332 + 0,384 X1 + 0,066 X2$$

Persamaan tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 8,332, yaitu bila SPI dan kompetensi tidak ada maka nilai akuntabilitas sebesar 8,322. Koefisien regresi SPI (X1) sebesar 0,384 dengan signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan penerapan SPI secara parsial berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas sebesar 0,384. Koefisien regresi kompetensi (X2) sebesar 0,066 dengan nilai signifikan sebesar 0,668 lebih besar dari 0,05 menunjukkan kompetensi secara parsial tidak mempengaruhi peningkatan kualitas akuntabilitas.

Untuk mengukur pengaruh SPI dan kompetensi secara simultan terhadap kualitas akuntabilitas, dilakukan uji signifikan simultan (Uji F), dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji F Pengaruh SPI dan Kompetensi Secara Simultan terhadap Akuntabilitas Pemerintahan desa

ANOVA ^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	213.412	2	106.706	29.647	.000 ^b
	Residual	151.166	42	3.599		
	Total	364.578	44			
a. Dependent Variable: Total_Y						
b. Predictors: (Constant), Total_X2, Total_X1						

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS 24

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa F_{hitung} sebesar 29,647 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, sedangkan nilai F_{tabel} dengan taraf signifikansi 5% derajat kebebasan (2; 43) sebesar 4,42. Pengujian ini menunjukkan nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} . Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa sistem pengendalian internal (X1) dan kompetensi aparatur desa (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintahan desa, sehingga sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa kedua variabel X1 dan X2 berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas.

2. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,535 ^a	,286	,258	1,854

a. Predictors: (Constant), Total_X2, Total_X1

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur kekuatan pengaruh SPI (X1) dan kompetensi (X2) terhadap akuntabilitas pemerintah desa (Y). Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,286, yang mempunyai arti bahwa bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y hanya sebesar 28,6%, sedangkan 71,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan analisa data diatas diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal (X1) secara pasrial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah desa (Y). Hal ini dapat dijelaskan bahwa sistem pengendalian yang baik meningkatkan akurasi data, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan serta ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, yang dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa.

Penelitian terkait pengaruh kompetensi aparatur desa (X2) secara partial terhadap akuntabilitas pemerintahan desa (Y), menemukan kedua variabel kompetensi tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil analisa data menunjukkan bahwa Pengaruh kompetensi hanya sebesar 6, 6%

dan 93,4% akuntabilitas dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu sistem pengendalian internal berbasis komputer yang diterapkan dalam mengelola keuangan desa. Melalui sistem tersebut seluruh proses pengelolaan keuangan mulai perencanaan sampai pelaporan dilakukan secara otomatis dan pegawai hanya mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arif Widyatama (2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa secara signifikan tidak mempengaruhi akuntabilitas pemerintah desa.

Uji koefisien determinasi (R^2), menunjukkan pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pemerintahan desa, sebesar 28,6%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, antara lain teknologi komputer yang diterapkan oleh pemerintahan desa sebagaimana telah dijelaskan diatas. Komputerisasi mengarahkan pegawai untuk bekerja mengikuti standar secara ketat dan tidak memberi ruang untuk adanya penyimpangan. Sistem komputer yang baik didalamnya telah memiliki unsur pengendalian internal yang dapat menjamin bahwa seluruh data yang diinput telah sesuai dan akurat. Hal ini sangat membantu aparatur desa yang memiliki keterbatasan kompetensi untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Pancawati, dkk (2020) yang menemukan bahwa sumber daya aparatur desa, komitmen organisasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Hal ini menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa yang akurat dan efektif serta efisien, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan tepat waktu serta relevan. Hal tersebut mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa, terutama dalam mengelola anggaran pendapatan serta belanja desa.

4.2 Saran

Pada bagian ini peneliti mencoba mengajukan beberapa saran berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas:

1. Bagi pemerintahan desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dorongan pemerintah desa untuk terus meningkatkan sistem pengendalian internal terutama dalam aktivitas pemantauan dan evaluasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas penelitian terhadap variabel-variabel lain terkait hubungan akuntabilitas pemerintah desa yang tidak penulis teliti pada penelitian ini.

5. REFERENSI

- Ramadhan, A. (2020). *Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada tahun 2019*. Jakarta: Kompas.com.
- Ni Komang Ayu, G. (2019). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman basis aktual, terhadap Kualitas Laporan Keuangan desa. . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.16.2.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Pres.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Iqbal, A. H. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Arif Widyatama, L. N. (2017). THE EFFECT OF COMPETENCE AND INTERNAL CONTROL SYSTEM ON VILLAGE GOVERNMENT ACCOUNTABILITY IN MANAGING ALOKASI DANA DESA (ADD). *BERKALA AKUNTANSI dan KEUANGAN INDONESIA, Vol 2, No.2*, 50-62.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Empat*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan YKPN.
- Romney, M. B. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 13, alihbahasa : Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosyidi, M. (2018). PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar). *JOM FEB, Vol 1, Edisi 1* , 1 - 14.
- Embun Widya Sari, N. A. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu . *JOM Fekon Vol.4 No.1*, 571.
- Nabila Zubaidi, D. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *International jurnal of Social Science & Business, Vol 3, No 2*, 68-76.
- Moehariono. (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hullah, A. R. (2012). Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill. Volume 3 Nomor 2* . , 8-21.
- Ekasari Sugiarti, I. Y. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa . *Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice (SNAB)* (pp. 580-590). Bandung: Universitas Widyatama.
- Dwi Sapartiningsih, S. (2018). ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 14 No.1*, 100-114.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, & Mixed Methods Approaches* (4th ed.). London: Sage Publications, Ltd.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research* (4th ed.). Boston: Pearson.

- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2013). *The Constructivist Credo*. Walnut Creek: Left Coast Press, Inc.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bangin. (2014). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Diponegoro.
- Pancawati Hardiningsih, U. G (2020). Does Competency, Commitment, and Internal Control Influence Accountability ?. *Journal of Asian Finance , Economics and Business* Vol7 No.4, 223-233